INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

ANALISIS KEAMANAN LAUT DAN IUUF Q1 - 2022

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE (IOJI)
27 April 2022

Metodologi Analisis

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

1. **Sumber Data AIS** (Automatic Identification System): **Marine Traffic.** Satelit AIS *marine traffic* memiliki *visibility* yang baik dalam mendeteksi AIS KIA Vietnam di Laut Natuna Utara
   a. Coverage yang baik untuk AIS Class A dan Class B di LNU
   b. Prefiks MMSI: 574 (Vietnam), Jenis Kapal: **Fishing, Unspecified**.
   c. Deteksi di ZEE non sengketa
   d. Memiliki informasi historical track kapal-kapal tersebut yang dapat digunakan untuk membuktikan kapal2 tersebut berasal dari pelabuhan di Vietnam.
2. **Sumber Data Citra Satelit**: ESA Sentinel-2. Citra satelit optik dengan resolusi 10 meter.
3. **Kriteria pendeteksian** dalam menentukan dugaan kuat KIA Vietnam yang menggunakan pair trawl, pada Citra Satelit:
   a. Menggunakan **citra (scene) yang relatif bersih dari awan**.
   b. Mendeteksi **objek (kapal) yang panjangnya 20-30 meter** dan bergerak **berpasangan dalam jarak tetap 300-400 meter** yang mengindikasikan penggunaan alat tangkap pair trawl.
   c. Pergerakan objek dikenali sebagai kapal yang bergerak karena **meninggalkan jejak riak air laut di bagian buritan kapal memanjang menjauhi buritan**.
4. Kriteria 3(b) dan 3(c) sesuai dengan ciri-ciri kapal di lapangan dalam menggunakan alat tangkap pair trawl.
5. **Sumber Data AIS dan Citra Satelit merupakan sumber data yang saling mendukung** jika disatukan dalam analisis untuk saling memverifikasi keberadaan kapal asing di ZEE Indonesia.

Ancaman Illegal Fishing KIA Vietnam (Sentinel-2) - Feb 2022

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

No	Nama Scene	Terdeteksi Di ZEE RI Landas Kontinen Non Sengketa	Terdeteksi Di ZEE Wilayah Sengketa RI-Vietnam
1	T48NXL_20220221T030741_TCI	6	0
2	T48NXM_20220221T030741_TCI	18	2
3	T49NBH_20220213T025819_TCI	0	20
4	T49NBG_20220218T025801_TCI	2	0
5	T49NBH_20220218T025801_TCI	0	92

Jumlah KIA Vietnam yang melakukan intrusi di ZEEI pada bulan Februari 2022 (26 KIA) menurun dibandingkan jumlah KIA Vietnam (51 KIA) pada bulan Februari 2021 dan 100 KIA pada bulan April 2021

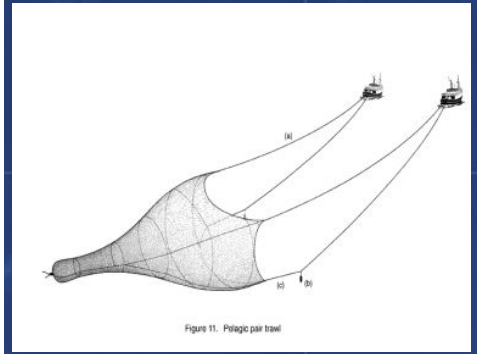

Ilustrasi kapal ikan dengan pair trawl

Pola KIA Vietnam berpasangan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl*, berdasarkan hasil Sentinel-2 dengan kecepatan tetap dan lambat

Ancaman Repeated Offenders Illegal Fishing KIA Vietnam (AIS) - Feb 2022

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

No	Nama Kapal	MMSI	Tanggal Deteksi	Longitude	Latitude	Terdeteksi Pada 2021 (*Repeated Offender*)
1	LRUT NHAY 52 TD83462	574070032	14-02-2022	108.1883	6.4693	Mei, Sep, Nov 2021
2	DANG59 F26	574802002	20-02-2022	108.0094	6.3816	Mei, Jul, Agu, Nov 2021
3	TAU CA	574001199	19-02-2022	106.3317	5.3682	-
4	D4	574141255	19-02-2022	106.3147	5.5632	Des 2021
5	HOANG HON TIEN	574117166	20-02-2022	109.8028	5.3125	Mar, Jul, Agu, Oct, Nov 2021
6	18 A 27	574151209	23-02-2022	109.707	5.3749	May, Oct, Nov 2021
7	VAN MINH 36A	574606051	23-02-2022	106.6635	5.2814	Mei 2021
8	PHO BIEN B9 P1	574566700	23-02-2022	106.4882	5.4507	Nov 2021
9	CONG MINH 1F7	574081001	23-02-2022	106.5789	5.1263	Mei 2021
10	NGOCLINH3 C9	574201524	23–02-2022	106.6297	5.0735	Mei 2021
11	LIAODALIVYU51523	88889999	23-02-2022	106.4942	5.1	-
12	T0NY SELDY	574609114	28-02-2022	107.8304	6.1806	-

Di bulan Februari 2022, terdapat 12 KIA Vietnam yang terdeteksi melakukan intrusi di ZEE Indonesia. 9 di antara kapal-kapal tersebut melakukan intrusi yang sama di tahun 2021 (*repeated offenders).*

Contoh Repeated Offender

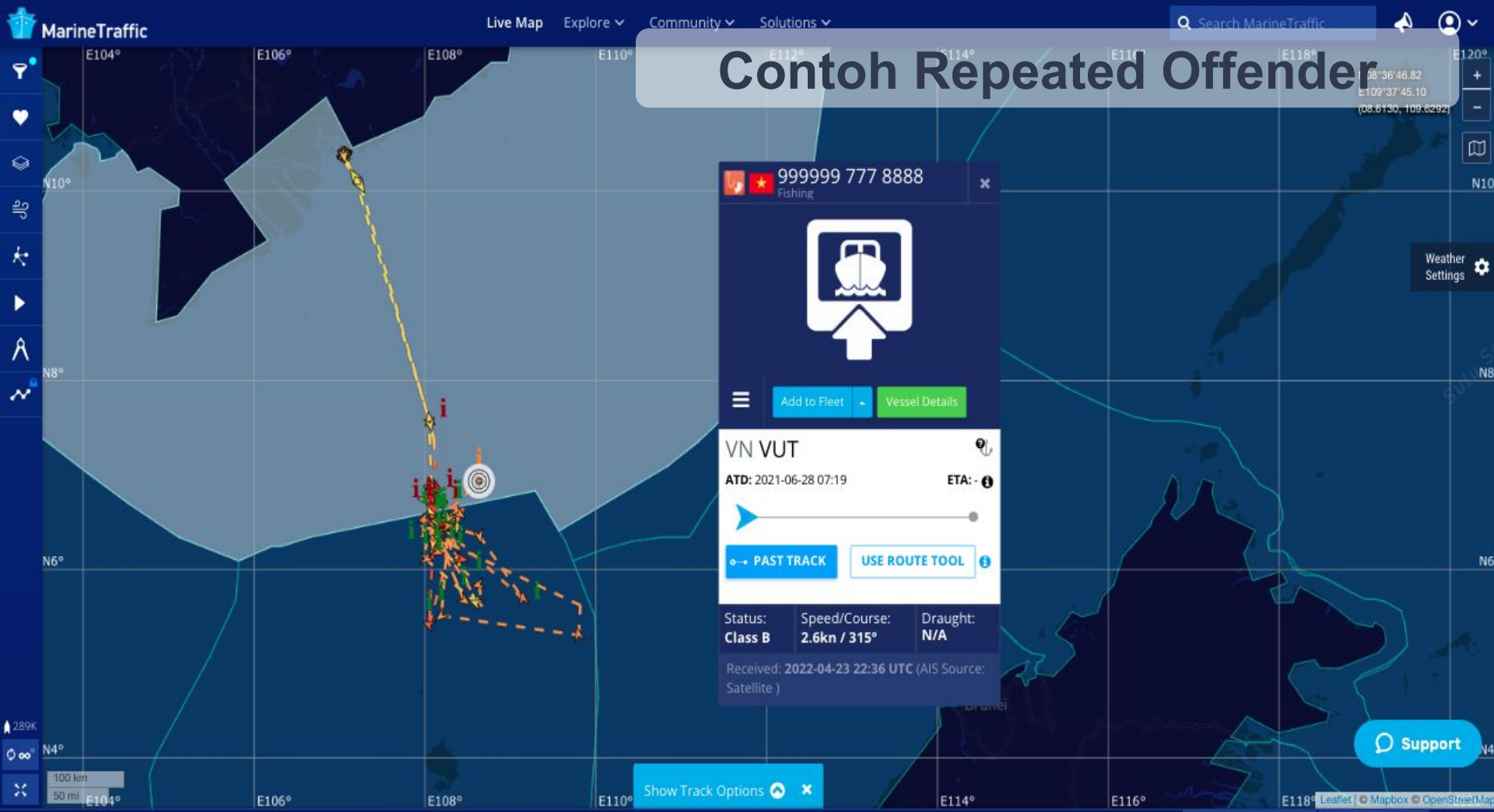

Tren Intrusi KIA Vietnam di Laut Natuna Utara Di Wilayah Non Sengketa

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

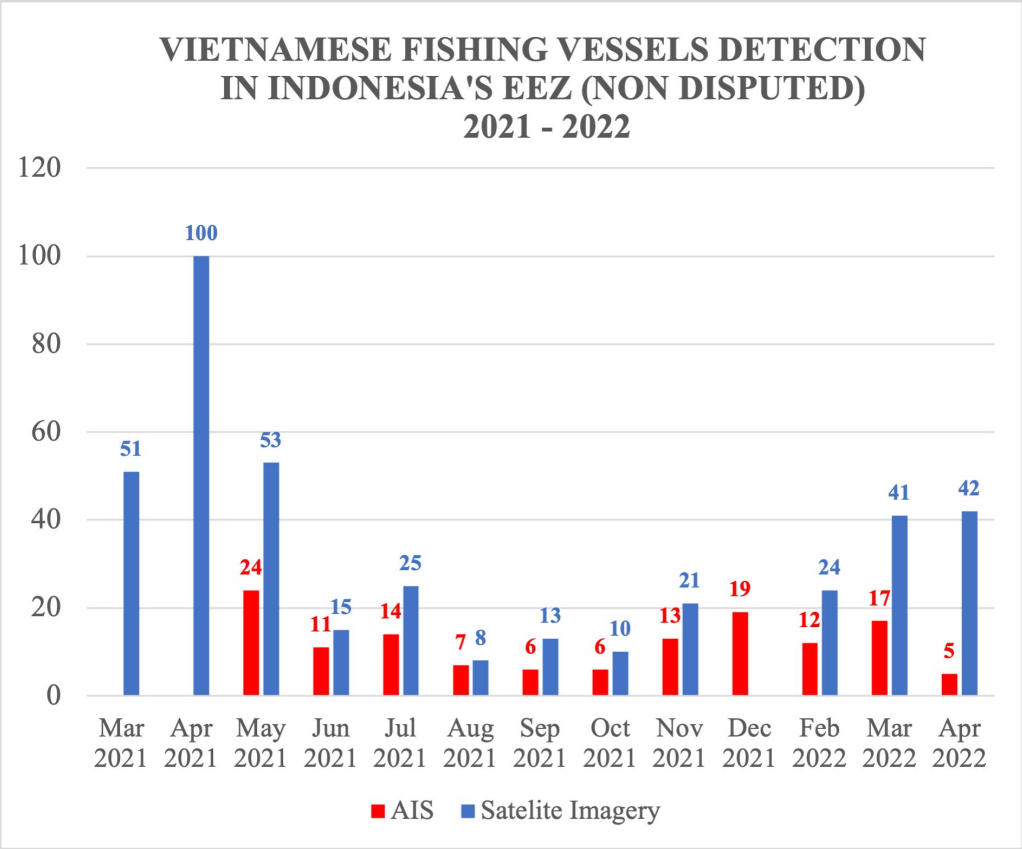

- Berdasarkan Citra Satelit, angka intrusi KIA yang tergambarkan di sebelah kiri adalah **angka tertinggi deteksi dalam 1 (satu) scene tiap bulan**.
- Pendeteksian KIA Vietnam **di ZEE non sengketa** pada Maret dan April 2022 mengalami peningkatan intrusi dibandingkan dengan Februari 2022.
- Illegal fishing tahunan **masih marak** terjadi di LNU oleh KIA Vietnam.
- Pola peningkatan yang sama terjadi pada tahun 2021 pada Maret dan April **namun dengan tingkat intrusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022**

Deteksi Terkini KIA Vietnam - April 2022

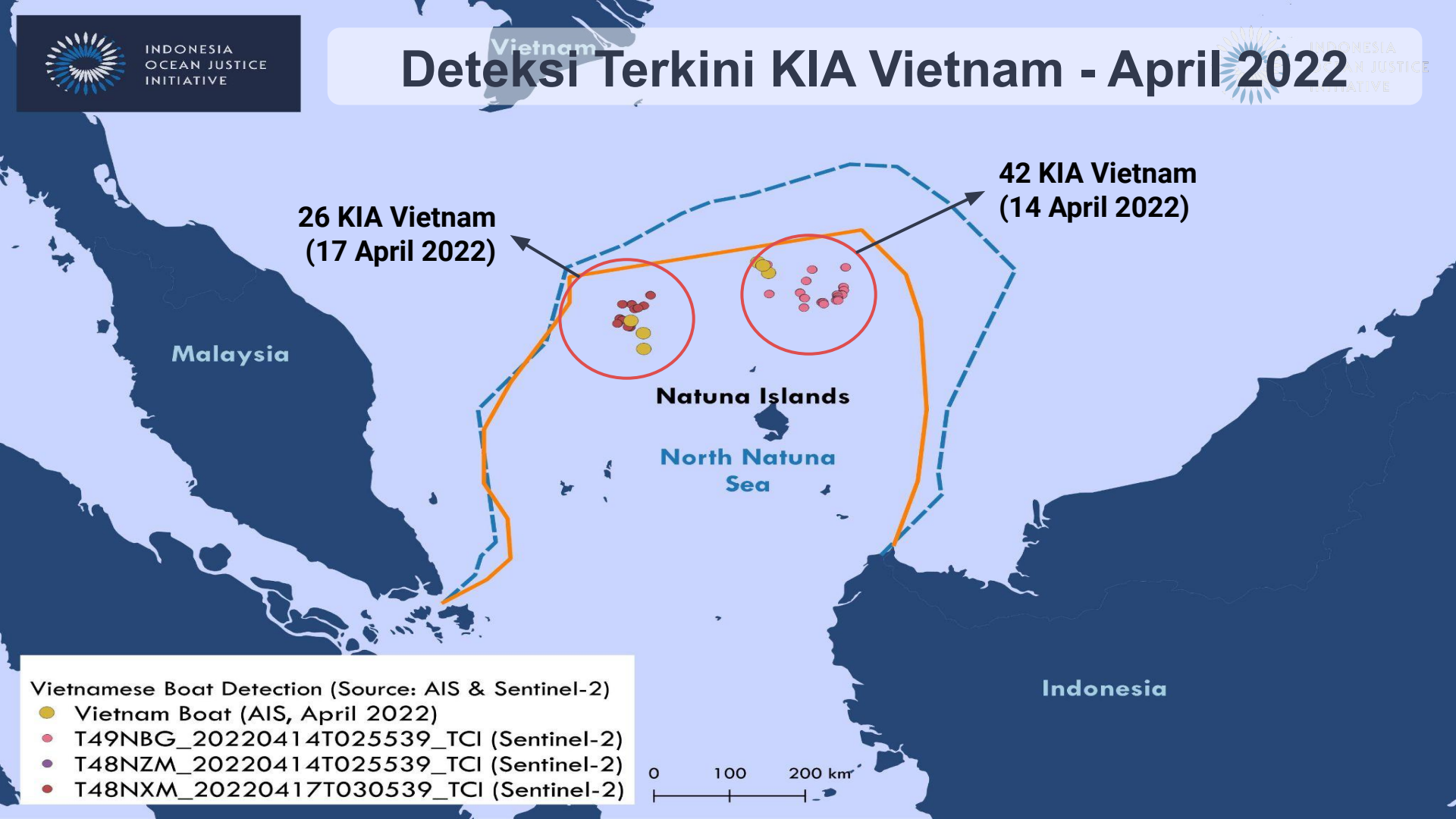

INTRUSI KIA TIONGKOK DI LNU DARI SOMALIA (Feb 2022)

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

Armada Kapal LIAO DONG YU terdeteksi beroperasi di Laut Natuna Utara (Liao Dong Yu 570, 571, 576, 578, 579, 580, 582, 585): 8 KIA Tiongkok

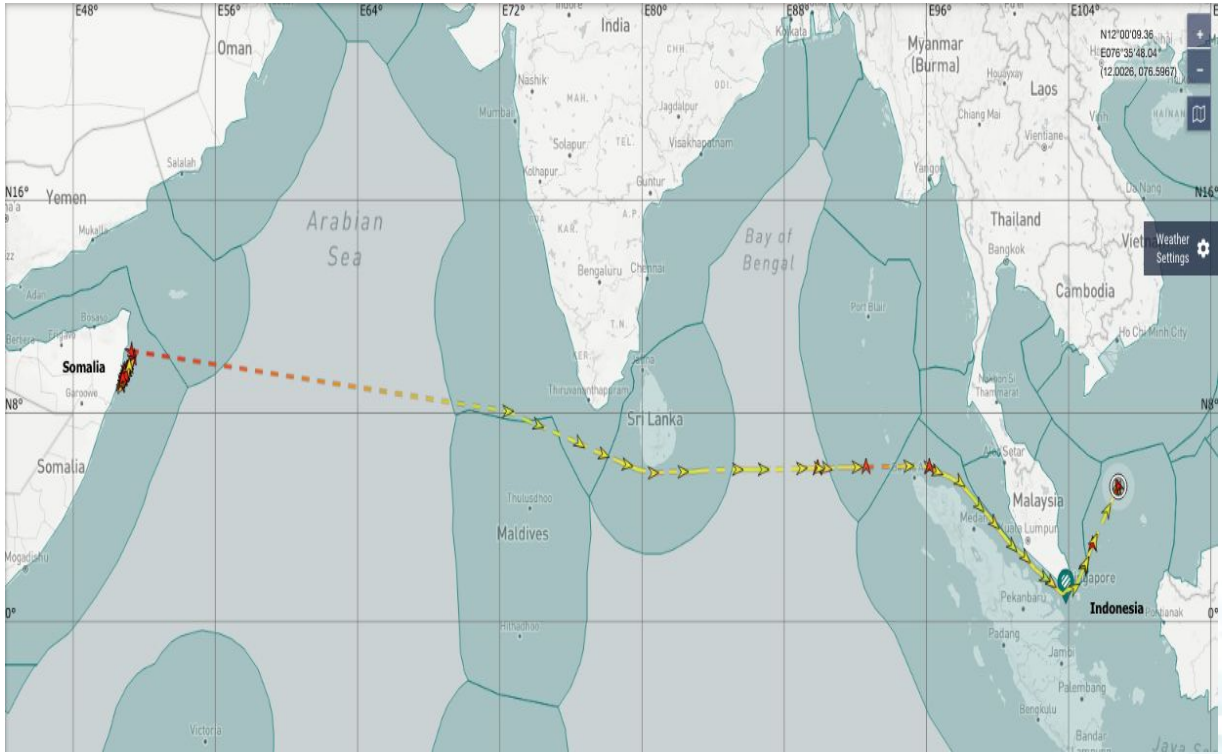

- Alat Tangkap Trawl
- Berbendera Tiongkok Melakukan Illegal fishing di Somalia (tidak terdaftar di Somalia)
- Liao Dung Yu 571: riwayat perbudakan ABK Indonesia di **Somalia** (Kompas.id, 2021)
- 3 Hari (18-21 Feb) di Laut Natuna Utara dalam kecepatan sangat rendah (rata-rata 2 knot)

INTRUSI KIA TIONGKOK DI LNU DARI KENYA (Oktober 2021)

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

Intrusi Armada Ikan Tiongkok Lu Qing Yuan Yu

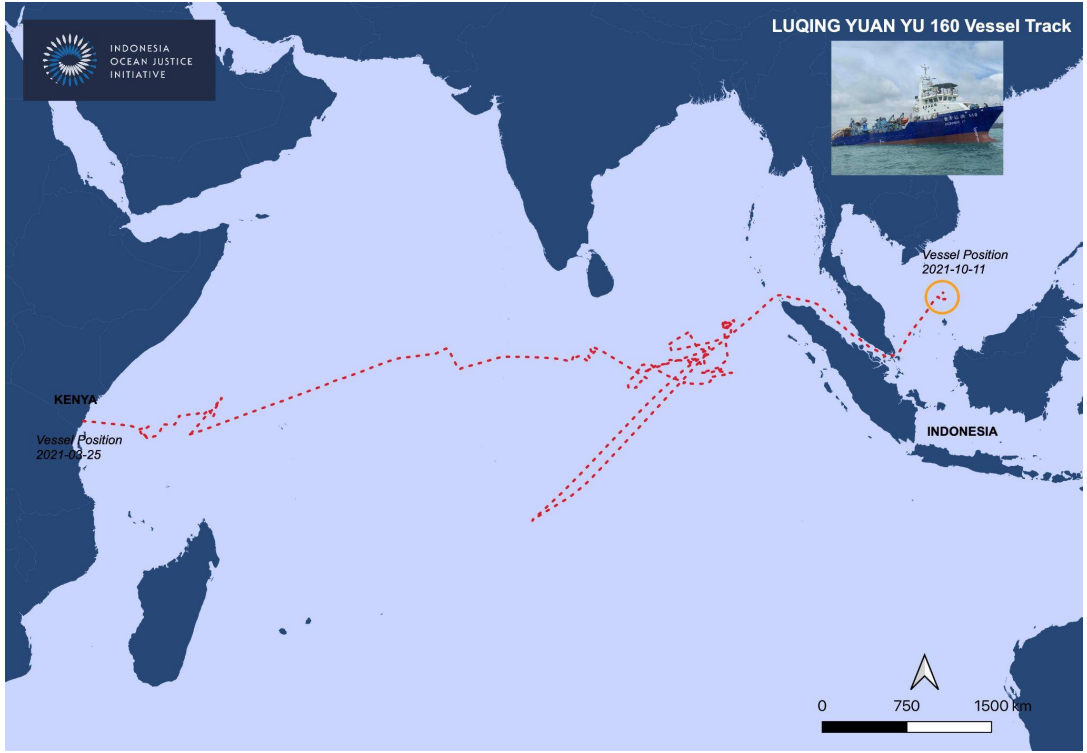

- Lu Qing Yuan Yu 155, 156, 159, 160: **490 GT *Trawlers***.
- 9 hari berada di LNU ZEE Indonesia pada 4-13 Oktober 2021 berdasarkan AIS.
- Diduga kuat melakukan Illegal fishing di **Kenya** sehingga dicabut benderanya, ***stateless***, dan telah melakukan eksploitasi ABK asal Kenya (*Nationafrica,* 2021)
- Pola pergerakan Armada Kapal Liao Dung Yu pada tahun 2022 **serupa dengan pola** Armada Kapal Lu Qing Yuan Yu pada tahun 2021

ANALISIS HUKUM TERHADAP ANCAMAN IUUF DI ZEE-I (LNU)

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

1. Berdasarkan UNCLOS 1982, negara pantai (*coastal state*) memiliki **kewenangan untuk memastikan kapal-kapal asing yang melintas di ZEE-nya mematuhi** segala peraturan terkait pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati, **termasuk melalui penghentian (*boarding*), pemeriksaan (*inspection*), dan penahanan kapal (*detention*) yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.**

2. Indonesia juga memiliki **kewajiban utama (*primary responsibility*)** untuk **mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan IUU-F** di ZEE Indonesia, termasuk KIA. Langkah tersebut termasuk penghentian, pemeriksaan, dan penahanan kapal, khususnya terhadap kapal-kapal yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di ZEE Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan penafsiran *International Tribunal of the Law of the Sea* (ITLOS) dalam *Request for An Advisory Opinion Submitted by the Sub-Regional Fisheries Committee* (SRFC) terhadap kewajiban negara bendera dalam pencegahan dan pemberantasan IUU-F dalam UNCLOS 1982 pada tahun 2015.

3. Pada tahun 2022, kecenderungan intrusi KIA Vietnam pada bulan Maret-April naik kembali, walaupun dibandingkan di tahun 2021, angka intrusi menurun. Namun demikian, IOJI berpendapat bahwa konsistensi pelanggaran yang dilakukan oleh KIA Vietnam dan Tiongkok merupakan ancaman yang serius bagi keamanan maritim Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, IOJI merekomendasikan 3 hal ini:
   a. Membantu nelayan agar mereka merasa aman dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan kehadiran nelayan juga membantu penyelenggaraan keamanan laut Indonesia
   b. Intensi dan penyinergian patroli pengawasan laut
   c. Diplomasi luar negeri yang cerdas dan kuat (*smart and robust diplomacy*) untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut terkait dengan batas negara dan klaim yang tidak berdasar dari negara-negara lain.

Intrusi Puluhan KII Pancing Cumi di ZEE Papua New Guinea

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

Berdasarkan AIS, IOJI mendeteksi Kapal Ikan Indonesia (KII) melakukan intrusi ke dalam ZEE negara lain, antara lain ZEE Papua Nugini. Indonesia memiliki *flag state responsibility* untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas IUU Fishing oleh KII di semua zona maritim, termasuk ZEE negara lain.

Intrusi Puluhan KII Pancing Cumi di ZEE Papua New Guinea

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

- Faktor Pendorong:
  1. Tren Penurunan Stok/Produksi Cumi di WPP 718, sejak 2017
  2. Demand Ekspor Cumi yang tinggi (Mayoritas ke Tiongkok)
  3. Tingkat pemanfaatan cumi di WPP 718 yang over exploited (Kepmen 19/2022)
- Dilakukan oleh KII Pancing Cumi yang berasal dari Jakarta
- Belum pernah terjadi sebelumnya intrusi masif tersebut (hingga 59 kapal, sejauh 50 km di ZEE PNG)

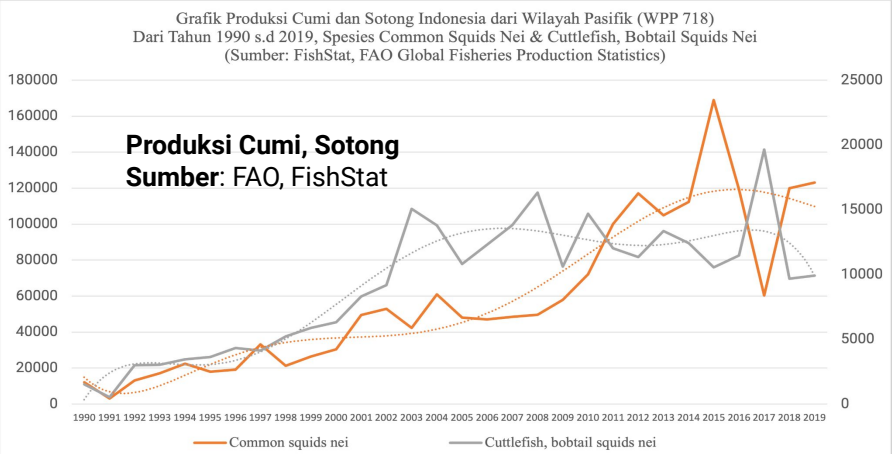

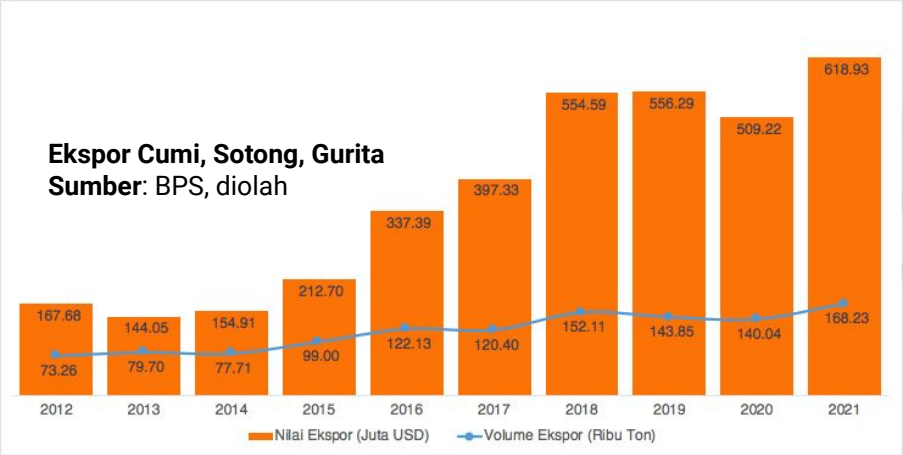

Stok Ikan di WPP 718 Berdasarkan Kepmen KP 2017 & 2022

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

	Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi
Kepmen KP 50/2017	836973	818870	876722	29485	62842	1187	1498	775	9212
Kepmen KP 19/2022	836973	818870	876722	29485	62842	1187	1498	775	9212

- Ditinjau dari studi FAO di slide sebelumnya, terlihat tren penurunan produksi cumi sejak tahun 2017. Bersama dengan insiden intrusi KII secara masif ke ZEE PNG, terdapat indikasi penurunan stok cumi di WPP 718. Namun demikian, jumlah stok cumi berdasarkan Kepmen tahun 2017 dan 2022 tidak berubah,
- Indikasi penurunan stok merupakan peringatan agar dilakukan rehabilitasi stok cumi di WPP 718 salah satunya dengan membatasi penangkapan kapal ikan pancing cumi di WPP 718.
- Menimbang WPP 718 termasuk dalam sistem kontrak dalam rencana kebijakan perikanan terukur, hendaknya pelaksanaannya ditinjau kembali .

PERAN DAN MANFAAT PP 13/2022 TERHADAP KEAMANAN LAUT

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

- Indonesia baru saja menerbitkan PP 13/2022 tentang **Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.** PP ini menegaskan bahwa kewenangan atas berbagai persoalan keamanan dan penegakan hukum di laut dimiliki oleh berbagai instansi Pemerintah (*Multi Agencies Multi Tasks*). PP 13/2022 bertujuan untuk **menyinergikan tugas dan fungsi semua instansi Pemerintah** yang berwenang di laut. Sinergi ini diupayakan melalui:
  1. Penyusunan Kebijakan Nasional Keamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
  2. Rencana Patroli Nasional
  3. Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut
  4. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
- Hasil dari patroli bersama, mandiri, dan terkoordinasi akan ditindaklanjuti oleh multi instansi penegak hukum yang berwenang. Tindak lanjut atas penegakan hukum di laut akan dievaluasi oleh Menkopolhukam secara berkala dan disampaikan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali (Pasal 32 PP 13/2022).

PERAN DAN MANFAAT PP 13/2022 TERHADAP KEAMANAN LAUT

INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

- Efektivitas pelaksanaan keamanan maritim akan sangat tergantung dari kemampuan negara **melibatkan seluruh *stakeholders* terkait (*maritime security community*), termasuk masyarakat sipil, dalam upaya penyelenggaraan keamanan laut** baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional (Bueger, 2015);
- Pelibatan masyarakat dijamin dalam PP 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sehingga Pemerintah diharapkan dapat lebih terbuka dan transparan dalam penanganan keamanan maritim terutama di wilayah yang selama ini menjadi target pencurian ikan oleh KIA, khususnya di Laut Natuna Utara. Penjelasan secara terbuka oleh Pemerintah tentang kondisi keamanan maritim di LNU diperlukan untuk mengundang partisipasi masyarakat untuk memastikan keamanan maritim dan sebagai bagian dari akuntabilitas publik.
- Berdasarkan PP 13 Tahun 2022, masyarakat **wajib melaporkan dugaan pelanggaran hukum, termasuk IUUF** di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia kepada Pusat Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut (Pasal 31). Hasil dari pengelolaan data dan informasi yang bersumber dari Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional **didiseminasikan kepada** instansi terkait, instansi teknis, **dan juga masyarakat** (Pasal 30 ayat 1 dan 2).
- IOJI mengharapkan pelaksanaan PP 13 Tahun 2022 dapat lebih meningkatkan 2 hal: **1) sinergi antara institusi** yang berwenang melakukan pemantauan, patroli, dan penegakan hukum, dan **2) peran serta masyarakat** yang memainkan peranan penting dalam mewujudkan keamanan maritim. Peran serta masyarakat terutama diperlukan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

Terima Kasih